

KEKUASAAN DAN WEWENANG POLITIK DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN MODERN

Salma Sausan Hakim¹, Saeful Mujab²

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

salmasausanhakim4@gmail.com¹, saeful.mujab@dsn.ubharajaya.ac.id²

ABSTRACT

Power and political authority are key elements in modern government, determining the direction of public policy and the stability of the political system. Power is understood as the ability to influence decisions and behaviour within the political realm, while authority refers to the legitimacy that accompanies the use of power based on laws and norms. This study aims to analyse the relationship between power and authority, identify the causes of power abuse, and examine the mechanisms of governance oversight. The study was conducted using a qualitative approach through a literature review of relevant books and academic journals. The results of the analysis show that imbalances between power and authority can lead to abuse of power, reduced accountability, and decreased public trust in the government. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, rendahnya integritas aparatur, dan dominasi kepentingan politik berkontribusi terhadap penyimpangan ini. The implementation of good governance principles such as transparency, accountability, and public participation is necessary to maintain balance in the use of power. Strengthening the oversight mechanism and consistent law enforcement is expected to create a more effective, fair and people-oriented governance system.

Keywords: political power, authority, good governance, legitimacy

ABSTRAK

Kekuasaan dan wewenang politik menjadi elemen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menentukan arah kebijakan publik serta stabilitas sistem politik. Kekuasaan dipahami sebagai kemampuan untuk memengaruhi keputusan dan perilaku dalam ranah politik, sedangkan wewenang merujuk pada legitimasi yang melekat pada penggunaan kekuasaan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kekuasaan dan wewenang, mengidentifikasi faktor penyebab penyimpangan kekuasaan, serta menelaah mekanisme pengawasan dalam tata kelola pemerintahan. Penulisan dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur yang bersumber dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara kekuasaan dan wewenang dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya akuntabilitas, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Faktor seperti lemahnya pengawasan, rendahnya integritas aparatur, serta dominasi kepentingan politik berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan tersebut. Penerapan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam penggunaan kekuasaan. Penguatan

mekanisme pengawasan serta penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: kekuasaan politik, wewenang, good governance, legitimasi

A. Pendahuluan

Kekuasaan politik selalu menempati posisi sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan kemampuan untuk menentukan arah kebijakan publik. Setiap sistem pemerintahan dibangun atas dasar distribusi kekuasaan yang terstruktur, baik melalui lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Penggunaan kekuasaan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terikat oleh wewenang yang memberikan legitimasi hukum dan moral. Legitimasi ini menjadi dasar penerimaan masyarakat terhadap tindakan pemerintah sehingga stabilitas politik dapat terjaga (Alim and Hakeu 2024). Ketidakseimbangan antara kekuasaan dan wewenang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta penyimpangan dalam praktik pemerintahan. Konsep kekuasaan dalam ilmu politik sering dipahami sebagai kemampuan untuk memengaruhi perilaku pihak lain sesuai dengan kehendak tertentu.

Kemampuan tersebut dapat bersumber dari berbagai aspek, termasuk kekuatan ekonomi, dukungan sosial, maupun kontrol terhadap sumber daya strategis. Wewenang kemudian hadir sebagai batas normatif yang mengatur penggunaan kekuasaan agar tidak melampaui ketentuan hukum yang berlaku (Iskandar 2026). Hubungan antara keduanya bersifat saling melengkapi karena kekuasaan tanpa wewenang cenderung menghasilkan tindakan otoriter, sedangkan wewenang tanpa kekuasaan akan kehilangan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan.

Struktur pemerintahan modern menunjukkan adanya pembagian kekuasaan yang dirancang untuk mencegah dominasi satu pihak. Prinsip pembagian tersebut dikenal melalui konsep trias politica yang membagi fungsi pemerintahan menjadi tiga cabang utama. Setiap cabang diberikan kewenangan tertentu yang saling mengawasi sehingga penyalahgunaan kekuasaan

dapat diminimalkan. Mekanisme pengawasan ini menjadi bagian dari sistem *checks and balances* yang bertujuan menjaga keseimbangan antar lembaga Negara (Irawan 2025). Penerapan prinsip tersebut tidak selalu berjalan optimal karena sering ditemukan adanya intervensi politik yang melemahkan fungsi pengawasan. Praktik pemerintahan menunjukkan bahwa kekuasaan sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini terlihat dari berbagai kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat publik. Penyimpangan tersebut dapat berupa korupsi, nepotisme, maupun penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi (Putra et al. 2025). Fenomena tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara penggunaan kekuasaan dengan batasan wewenang yang telah ditetapkan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Legitimasi wewenang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan kekuasaan politik.

Legitimasi diperoleh melalui pengakuan masyarakat terhadap keabsahan suatu pemerintahan. Pengakuan tersebut biasanya didasarkan pada konstitusi, hukum, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat cenderung lebih mudah menjalankan kebijakan karena mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, lemahnya legitimasi dapat memicu resistensi sosial serta konflik politik yang berkepanjangan (Talaohu et al. 2025). Sistem demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam menentukan pemimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi tersebut menjadi sarana untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan kepentingan publik. Pemilu, kebebasan berpendapat, serta keberadaan media massa menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah (Rahmatullah 2024). Fungsi kontrol sosial ini diharapkan mampu membatasi penyalahgunaan kekuasaan serta memperkuat legitimasi wewenang yang dimiliki oleh pejabat publik.

Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi dinamika kekuasaan dan wewenang dalam pemerintahan. Akses informasi yang semakin luas memungkinkan masyarakat untuk memantau kebijakan pemerintah secara lebih intensif. Transparansi menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan karena informasi publik dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan agar tidak menimbulkan kritik atau penolakan dari masyarakat (Nasyirudin 2025). Pengawasan tidak lagi hanya dilakukan oleh lembaga formal, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui berbagai platform komunikasi. Hubungan antara kekuasaan dan wewenang juga dipengaruhi oleh faktor budaya politik yang berkembang dalam suatu negara. Budaya politik mencerminkan pola sikap dan perilaku masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku. Nilai-nilai seperti kepatuhan terhadap hukum, kesadaran politik, serta tingkat partisipasi masyarakat akan memengaruhi bagaimana kekuasaan dijalankan (Marpaung, Siahaan, and Siagian 2024). Budaya politik yang

demokratis cenderung mendukung penggunaan kekuasaan secara bertanggung jawab, sedangkan budaya politik yang paternalistik dapat memperkuat dominasi elite dalam pengambilan keputusan.

Kerangka hukum memiliki peran penting dalam mengatur batasan kekuasaan dan wewenang politik. Konstitusi sebagai hukum dasar negara menetapkan prinsip-prinsip utama yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga negara. Peraturan perundang-undangan kemudian memberikan rincian mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap penggunaan kekuasaan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan. Kelemahan dalam penegakan hukum sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyalahgunakan wewenang (Muhtar, M H, Maranjaya 2023). Penguatan institusi pemerintahan menjadi langkah yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan wewenang. Institusi yang kuat akan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif serta menindak pelanggaran yang terjadi. Reformasi birokrasi juga

diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Sistem yang transparan dan akuntabel akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih bersih serta berorientasi pada pelayanan publik.

Permasalahan mengenai kekuasaan dan wewenang politik tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Etika politik mengatur norma perilaku yang harus dipatuhi oleh pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Integritas, kejujuran, serta tanggung jawab menjadi nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Pelanggaran terhadap etika politik sering kali menjadi awal dari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Rafi 2024). Oleh karena itu, pembinaan moral aparatur negara menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan. Fenomena global menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat tidak lagi hanya menuntut hasil kebijakan, tetapi juga proses pengambilan keputusan yang terbuka. Tekanan ini mendorong pemerintah

untuk menyesuaikan cara kerja agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Adaptasi terhadap tuntutan tersebut menjadi tantangan tersendiri karena harus diimbangi dengan kemampuan institusi dalam mengelola kekuasaan secara efektif.

Kajian mengenai kekuasaan dan wewenang politik menjadi relevan untuk memahami dinamika pemerintahan modern. Analisis terhadap hubungan keduanya dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan publik dihasilkan serta bagaimana kekuasaan dijalankan dalam praktik. Pemahaman ini diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul serta merumuskan solusi yang tepat. Upaya perbaikan sistem pemerintahan harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara kekuasaan dan wewenang agar tercipta tata kelola yang adil dan bertanggung jawab. Pembahasan mengenai topik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik serta praktik pemerintahan yang lebih baik. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara kekuasaan dan wewenang serta implikasinya terhadap kualitas tata

kelola pemerintahan. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada analisis teoritis dan empiris sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang terjadi. Hasil kajian diharapkan mampu menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

B. Metode Penelitian

Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang berfokus pada analisis konsep serta teori yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang politik. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta sumber akademik lain yang relevan dengan topik pembahasan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan cara menelaah berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan konsep kekuasaan, wewenang, legitimasi, serta tata kelola pemerintahan modern. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji, membandingkan, serta

menginterpretasikan berbagai pandangan teoritis yang telah dikemukakan oleh para ahli. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai hubungan antara kekuasaan dan wewenang dalam praktik pemerintahan. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan kajian yang objektif serta berbasis pada landasan teoritis yang kuat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Konsep Kekuasaan dan Wewenang dalam Pemerintahan Modern

Konsep kekuasaan dan wewenang dalam pemerintahan modern menunjukkan hubungan yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan negara. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk memengaruhi dan menentukan arah kebijakan publik, sedangkan wewenang menjadi dasar legitimasi agar penggunaan kekuasaan memiliki landasan hukum yang jelas dan diterima masyarakat. Pembagian kekuasaan diterapkan untuk mencegah dominasi satu

pihak serta menjaga penggunaan kekuasaan tetap sesuai dengan koridor hukum (Arif 2024).

Penggunaan kekuasaan tidak hanya bergantung pada kedudukan formal pejabat publik, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, dan politik. Kekuasaan dapat dijalankan melalui pengambilan keputusan, pengendalian agenda kebijakan, maupun pembentukan opini publik sehingga diperlukan pengawasan agar tidak menyimpang dari tujuan pemerintahan (Bauhr and Grimes 2022). Wewenang yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan memberikan legitimasi bagi pemerintah, yang juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Kekuasaan dan wewenang memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan memerlukan wewenang agar sah, sedangkan wewenang memerlukan kekuasaan agar dapat dijalankan secara efektif (Zulkarwin 2021). Ketidakseimbangan keduanya dapat menimbulkan tindakan otoriter atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya, hubungan tersebut sering

menghadapi tantangan seperti intervensi politik, kepentingan kelompok, dan lemahnya penegakan hukum. Penyimpangan penggunaan kekuasaan akibat pelaksanaan wewenang yang tidak konsisten dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan mengganggu stabilitas politik (Arif 2024).

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan bergantung pada keseimbangan antara kekuasaan dan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan distribusi kekuasaan yang proporsional, pelaksanaan wewenang sesuai hukum, serta penguatan pengawasan dan transparansi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang adil, stabil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Relasi Kekuasaan dan Wewenang dalam Praktik Tata Kelola Pemerintahan

Relasi antara kekuasaan dan wewenang dalam tata kelola pemerintahan dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan dinamika politik. Kekuasaan dijalankan melalui institusi negara yang memiliki kewenangan formal, sedangkan

wewenang menjadi dasar legitimasi setiap tindakan pemerintah. Pembagian kekuasaan ke dalam beberapa lembaga bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan serta menciptakan mekanisme koordinasi dan pengawasan, meskipun dalam praktiknya sering dipengaruhi oleh kepentingan politik (Rizkiyani 2024).

Dalam praktik pemerintahan, kekuasaan terkadang digunakan untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu sehingga kebijakan bergeser dari kepentingan publik. Wewenang yang seharusnya membatasi penggunaan kekuasaan dapat kehilangan fungsinya apabila pengawasan tidak berjalan efektif, yang berdampak pada menurunnya responsivitas kebijakan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Harahap, Nadya, and Sitanggang 2023).

Relasi antara kekuasaan dan wewenang juga tampak dalam implementasi kebijakan publik. Kekuasaan diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, sedangkan wewenang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaannya. Penyimpangan

implementasi dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kapasitas institusi, serta kepentingan pribadi, sehingga hubungan keduanya tidak hanya penting pada tahap perumusan, tetapi juga pelaksanaan kebijakan (Jamal and Putera 2025).

Selain itu, faktor eksternal seperti masyarakat, media, dan kelompok kepentingan turut memengaruhi penggunaan kekuasaan. Partisipasi masyarakat menjadi bentuk pengawasan yang memperkuat legitimasi pemerintah dan memastikan wewenang digunakan untuk kepentingan publik (Vinanda et al. 2025).

Dengan demikian, keseimbangan antara kekuasaan dan wewenang perlu dijaga melalui penguatan institusi, peningkatan transparansi, penegakan hukum, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Penerapan prinsip akuntabilitas akan memperkuat legitimasi wewenang serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang stabil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penyimpangan Kekuasaan dan Faktor Penyebabnya

Penyimpangan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan mencerminkan penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan batas wewenang yang telah ditetapkan. Menurut (Tory and Hanum 2025) Penyimpangan tersebut muncul dalam berbagai bentuk seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, serta praktik nepotisme yang menguntungkan kelompok tertentu. Tindakan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip hukum dan norma yang seharusnya menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan. Kondisi ini tidak hanya merusak integritas institusi pemerintahan, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Ketika kekuasaan digunakan tanpa kontrol yang memadai, potensi terjadinya penyimpangan akan semakin besar.

Faktor kelemahan sistem pengawasan menjadi salah satu

penyebab utama terjadinya penyimpangan kekuasaan. Mekanisme pengawasan yang tidak berjalan efektif memberikan ruang bagi pejabat publik untuk menggunakan kewenangannya secara tidak tepat. Pengawasan internal yang lemah serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan memperbesar peluang terjadinya pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan pelaksanaan pengawasan yang konsisten. Sistem yang tidak mampu mengawasi penggunaan kekuasaan secara optimal akan sulit mencegah terjadinya penyimpangan (Ruben, Thamrin, and Ihsan 2025). Faktor lain yang memengaruhi penyimpangan kekuasaan berkaitan dengan rendahnya integritas aparatur negara. Nilai etika yang tidak dijalankan dengan baik dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kepentingan pribadi atau kelompok sering ditempatkan di atas kepentingan publik sehingga fungsi pelayanan pemerintah menjadi terganggu. Kondisi ini mencerminkan adanya kegagalan

dalam pembinaan moral serta lemahnya budaya organisasi dalam institusi pemerintahan. Integritas menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa kekuasaan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Distribusi kekuasaan yang tidak seimbang juga berkontribusi terhadap munculnya penyimpangan. Konsentrasi kekuasaan pada satu pihak tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif akan meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. Ketimpangan ini dapat terjadi akibat lemahnya fungsi lembaga pengawas atau adanya intervensi politik yang menghambat pelaksanaan pengawasan. Struktur kekuasaan yang tidak seimbang akan menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya dominasi oleh kelompok tertentu. Dominasi tersebut sering kali digunakan untuk mempertahankan kepentingan tanpa memperhatikan kepentingan public (Alam, Baeha, and Christabel 2025). Pengaruh faktor eksternal seperti tekanan politik dan ekonomi juga dapat memicu penyimpangan kekuasaan. Kepentingan pihak

tertentu yang memiliki sumber daya besar dapat memengaruhi kebijakan pemerintah melalui berbagai cara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh kekuatan di luar struktur formal pemerintahan. Intervensi tersebut dapat mengganggu independensi dalam pengambilan keputusan serta melemahkan legitimasi wewenang yang dimiliki oleh pemerintah.

Upaya pencegahan penyimpangan kekuasaan memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum, serta peningkatan integritas aparatur negara. Sistem pengawasan yang efektif harus mampu mendeteksi serta menindak setiap pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera serta mencegah terulangnya penyimpangan. Pembinaan etika serta peningkatan profesionalisme aparatur negara menjadi langkah yang diperlukan untuk memperkuat budaya integritas dalam pemerintahan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih transparan serta

bertanggung jawab dalam penggunaan kekuasaan.

mengakses dan menilai kinerja pemerintah.

Mekanisme Pengawasan dan Penguatan Good Governance

Mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tetap berada dalam batas wewenang yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui sistem yang terstruktur, baik secara internal maupun eksternal, guna mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan (Arrazak and Frinaldi 2024). Pengawasan internal dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan melalui prosedur administratif dan pengendalian birokrasi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen serta masyarakat. Keberadaan sistem pengawasan yang efektif akan membatasi ruang gerak penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan hukum. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan karena memungkinkan masyarakat untuk

Penguatan prinsip good governance menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Prinsip ini menekankan pada transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan. Transparansi memberikan akses informasi yang jelas mengenai kebijakan dan tindakan pemerintah, sedangkan akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil. Menurut (Suriadi 2025) Partisipasi masyarakat memberikan ruang bagi publik untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan serta mengawasi jalannya pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan memperkuat legitimasi wewenang serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara

Peran lembaga pengawas memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan wewenang. Lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan

terhadap kebijakan pemerintah, sedangkan lembaga yudikatif berperan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Keberadaan lembaga independen juga diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi politik (Nanda Herlinanur 2024). Sinergi antar lembaga pengawas akan menciptakan sistem kontrol yang lebih efektif dalam mengawasi penggunaan kekuasaan. Ketidakefektifan salah satu lembaga pengawas dapat melemahkan keseluruhan sistem pengawasan. Tantangan dalam penerapan mekanisme pengawasan sering berkaitan dengan keterbatasan kapasitas institusi serta rendahnya integritas aparatur negara. Kelemahan dalam sistem birokrasi dapat menghambat pelaksanaan pengawasan secara optimal. Penyimpangan yang tetap terjadi menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan secara maksimal. Upaya perbaikan diperlukan melalui reformasi kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan. Sistem pengawasan yang berbasis pada teknologi informasi dapat

meningkatkan efisiensi serta memperluas jangkauan pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan.

Keseimbangan antara kekuasaan dan wewenang hanya dapat dicapai melalui penerapan mekanisme pengawasan yang konsisten serta penguatan prinsip good governance. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa setiap penggunaan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Penegakan hukum yang tegas menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sistem pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik.

D. Kesimpulan

Kekuasaan dan wewenang politik menunjukkan hubungan yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Kekuasaan dipahami sebagai kemampuan untuk memengaruhi dan menentukan kebijakan publik, sedangkan wewenang memberikan dasar legitimasi terhadap penggunaan

kekuasaan tersebut. Keberadaan legitimasi menjadi penentu penerimaan masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Keseimbangan antara kekuasaan dan wewenang diperlukan agar pelaksanaan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum serta mampu menciptakan stabilitas politik.

Relasi antara kekuasaan dan wewenang dalam praktik pemerintahan menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, kepentingan politik, serta kualitas institusi. Ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut dapat memicu penyimpangan kekuasaan seperti penyalahgunaan jabatan dan praktik korupsi. Faktor penyebab penyimpangan meliputi lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas aparatur negara, serta ketimpangan distribusi kekuasaan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat serta terganggunya efektivitas kebijakan publik.

Mekanisme pengawasan yang efektif serta penerapan prinsip good governance diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara

kekuasaan dan wewenang. Penguatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum yang konsisten serta reformasi kelembagaan akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih bertanggung jawab. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan legitimasi pemerintah serta memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan publik secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Ruben Nicholas, David Lestarius Immanuel Baeha, and Kezia Estevania Christabel. 2025. "Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Ketatanegaran." *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 7(5):3509–17.
- Alim, M. S. and F. Hakeu. 2024. "Ilmu Politik & Kebijakan Publik." P. 159 Hlm.17 in. Mega Press Nusantara.

- Arif, Imran. 2024. "Legitimacy of Government and Governance." *Journal of Institutional Economics* 20:1–23.
- Arrazak, Muhammad Afdhal and Aldri Frinaldi. 2024. "Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Hukum* 2:927–30.
- Ayu Widowati Johannes. 2024. "PENGAWASAN PEMERINTAHAN Dalam Ulasan Teori Dan Praktek." P. 155 Hlm.100 in. CV. Rtujuh Media Printing.
- Bauhr, Monika and Marcia Grimes. 2022. *Democracy and the Quality of Government*. Oxford University Press.
- Duda, Lia Mastaria, Roslan Ishak, Mahmud Ahmad, and Nurwita Ismail. 2026. "Implementasi Prinsip Checks and Balances Melalui Penguatan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Equality: Law and Social* 1:2024–27.
- Harahap, Maysarah, Ruth Nadya, and Winanda Sitanggang. 2023. "Elit Politik Di Indonesia : Akar Dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3(6):2149–60.
- Irawan, Soni. 2025. "Tinjauan Yuridis Pembagian Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Teori Trias Politica." *Justici* 18(2 SE-Articles).
- Iskandar, I. W. 2026. "Pengantar Ilmu Politik." P. 170 Hlm.125 in. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Jamal, Edo Syahputra and Roni Ekha Putera. 2025. "Relasi Kekuasaan Politik Dan Fragmentasi Kepentingan Dalam Jaringan Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Agam." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4(3):1438–45.
- Marpaung, R., M. M. Siahaan, and R. C. Siagian. 2024. "Dinamika Perilaku Dan

- Budaya Politik Dalam Sistem Pemerintahan Global." P. 129 Hlm.22 in. Pradina Pustaka.
- Muhtar, M H, Maranjaya, A. K. 2023. "TEORI & HUKUM KONSTITUSI : Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia." P. 93 Hlm.28 in. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Najwah Addina. 2025. "Pendidikan Dan Kekuasaan: Antara Pembebasan Dan Dominasi Perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Dan Paulo Freire." *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 2(4 SE-Articles):196–210.
- Nanda Herlinanur. 2024. "Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check and Balance." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3(1).
- Nasyirudin, M. 2025. "Sosiologi Pemerintahan." P. 158 Hlm.28 in. CV Eureka Media Aksara.
- Nickolaz Boy Regawoge, Siti Aminah Mega Putri, Maria Ulfa, and Parningotan Malau. 2026. "Studi Keterkaitan Negara Hukum Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Politik Hukum ." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4(2 SE-Articles):763–72.
- Nuradhawati, R., M. A. Rahmandika, N. G. Permata, E. Efitra, and I. Uzma. 2025. "Etika Kepemimpinan Dalam Pemerintahan: Membangun Integritas Dan Kepercayaan Publik." P. 330 Hlm.238 in. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pratiwi, Sintia Wahyu. 2025. "Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Penataran." (*Konstitusi Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2(4):132–43.
- Putra, Jamiluddin A. M., Dewi Permata, Anjelina I. P. Djani, Debora L. Sabetu, Yunita

- N. Finit, and Fadil Mas'ud. 2025. "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan Dan Peluang Dalam Mengatasi Kesewenang-Wenangan." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3(02 SE-Artikel):1239–51.
- Rafi, M. 2024. "Pengantar Etika Politik: Membangun Paradigma Hidup Bernegara Dengan Moralitas Dan Tanggung Jawab." P. 208 Hlm.93 in. Anak Hebat Indonesia.
- Rahmatullah. 2024. "Diskursus Tentang Konsep Demokrasi, Partisipasi Politik Dan Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 1.
- Rizkiyani, Shabrina. 2024. "Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan." *KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1(4):82–93.
- Ruben, M. Ali, Husni Thamrin, and Muhammad Ihsan. 2025. "Wewenang Dalam Distribusi Dana Hibah: Studi Empiris Kasus KONI Sumsel Tahun 2019-2023 Dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi." *Urnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(4):5470–77.
- Saputri, Selsyah. 2026. "Analisis Penegakan Integritas Dan Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi ialah Program Penting Pemerintah Indonesia Untuk Menciptakan Sistem Pemerintahan Yang Efisien Dan Juga Memberikan Layanan Publik Yang Berkualitas Ting." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3(2):93–104.
- Saragih, M. W., F. P. Adela, O. Sukmana, A. Anshari, M. Kamil, R. Ramadhany, V. Lumbanraja, F. H. S. Damanik, A. Nurjaman, M. P. Palupi, and others. 2025. "Pengantar Ilmu Politik: Buku Ajar." P. 315 Hlm. 110 in. Star Digital Publishing. Savirani, A., G. Lele, H. Ikhwan, H.

- Suyatna, M. Hapsari, M. L. Pinem, and W. P. Utomo. 2025. "Pengantar Kajian Kekuasaan." P. 132 Hlm.14 in. UGM PRESS.
- Sawir, M. 2020. "Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi." P. 165 Hlm.31 in. Deepublish.
- Suriadi, Hari. 2025. "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia: Kajian Teoretis Atas Prinsip, Tantangan Dan Strategi Implementasi." *Jurnal Ilmu Sosial , Ekonomi Dan Pendidikan* 1(1):42–54.
- Talaohu, A. R., A. A. Kusumoningtyas, A. N. Paryati, S. N. Islami, E. I. Rahim, S. Sulaiman, A. Sulaeman, A. Firdaus, and H. B. Maula. 2025. "Politik Dan Pemerintahan." P. 137 Hlm.26 in. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Tarigan, R. S. 2024. "Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara." P. Hlm.92 in. Ruang Karya Bersama.
- Tory, Tingka Febry and Rizkia Amelia Hanum. 2025. "Nepotisme Dan Korupsi Di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 3(1):126–35.
- Utomo, Nazwa Kaila and Ajeng Tita Nawangsari. 2025. "Transparansi Dan Akuntabilitas Sektor Publik : Pilar Utama Dalam Good Governance." *JAZ; JURNAL AKUNTANSI UNIHAZ* 8(2):103–9.
- Vinanda, Olivia Rizka, Selis Setia Asih, Salwa Rizki Kusuma, Bella Shapira Minata, Rozikin Akbar, and Irfan Gynansiar. 2025. "Kebijakan Publik Political Participation Of Civil Society In Public Policy Monitoring." *JlIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2(5):10240–47.
- Zulkarwin. 2021. "Corruption and Legitimacy." *Journal of Governance* 6(1):62–72